

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PELAKSANAAN
UPAH BURUH PETIK SAWIT DENGAN UPAH BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh:
SHOLIKHUL HUDA
NPM.1721030417



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TENTANG PELAKSANAAN
UPAH BURUH PETIK SAWIT DENGAN UPAH BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:
SHOLIKHUL HUDA
NPM.1721030417**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTAK

Upah borongan ini dapat merugikan kedua belah pihak, dikarenakan ketidakpastian pendapatan buah sawit, lama waktu pekerjaan dan beban kerja. Kerugian dapat dialami pihak *mu'ajir*, contoh Lukman merupakan salah satu buruh petik sawit, lukman bekerja memetik sawit milik Markum selaku *musta'jir*, yang memiliki luas lahan perkebunan sawit seluas 1 ha, dengan upah borongan sebesar Rp 500.000. Namun setelah selesai pekerjaannya ternyata dalam memanen buah sawitnya memakan waktu yang lama dan beban kerja yang jelas lebih berat. Dan hasil buah sawit yang dipanen ternyata mencapai bobot hingga 5 Ton. Dengan perhitungan 5 Ton buah sawit dikalikan dengan harga Rp 1000 dan potongan 8%, sehingga uang hasil panen senilai Rp 4.600.000. Seharusnya dengan jumlah Tonase tersebut buruh sawit dapat menerima upah senilai Rp 1.500.000. bukan hanya Rp 500.000. Sedangkan kerugian dapat dialami oleh *musta'jir* apabila buah sawit yang dipanen hanya sedikit. Selain itu juga upah dibayarkan paling cepat setelah 1 minggu panen.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktek pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan upah borongan di Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara? Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan upah borongan di Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara? Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk meneliti dan mengetahui mengenai praktek pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan upah borongan di Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Kemudian untuk jenis penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Dan Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah akad upah terjadi diawali karena adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh (*mu'jir dan musta'jir*), upah yang diberikan berbentuk uang tunai dan upah diberikan paling cepat setelah satu minggu panen. Sedangkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan upah borongan ini bila dikaitkan dengan konsep muamalah telah sesuai karena Rukun dan Syarat *Ijarah* dalam upah borongan petik sawit ini telah terpenuhi dan mengenai upah yang ditunda untuk dibayarkan dibolehkan karena sudah kesepakatan kedua belah pihak dan penundaan itu tidak disengajakan melainkan karena menunggu buah Sawit yang dipanen laku terjual terlebih dahulu sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan
Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan (Studi
Kasus di Desa Batu Nangkop
Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)
Nama Mahasiswa : Sholikhul Huda
NPM : 1721030417
Fakultas : Syaria'h

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M.
NIP. 195703051978031001

Pembimbing II

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan (Studi Kasus Di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)**, disusun oleh **Sholikhul Huda, NPM. 1721030417**, Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, sudah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/ Tanggal: Kamis 08 April 2021

TIM PENGUJI:

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.



Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. KHAIRUDDIN, M.H.

NIP.196210221993031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholikhul Huda
Npm : 1721030417
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonom Syari'ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 29 Maret 2021

Penulis,




Sholikhul Huda
NPM 1721030417

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ع وَأَتَمِّرُوا^ع بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ع وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ^ع فَسْتَرْضِعْ لَهُ^ع
أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.
(Surat At-Thalaq [65] ayat 6).

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, bapak Sarwito dan ibu Ismiati, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta doa kalian yang selalu mengiringi langkah perjalanan hidupku.
2. Ketiga Saudaraku Mba Diana Novita Sari, Mas Sukron Anwar dan adik Diah Ayu Wulan Ndari yang tiada hentinya memberikan dukungan selama ini.
3. Alamamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik selama aku menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, bekarya, dan berkualitas.
4. Bapak/Ibu dosen yang selama ini telah menuntunku ke jalan yang lurus, memberikan ilmunya kepadaku dengan tulus.
5. Sahabat-sahabatku “Riki Ari Irawan, Sayyid Adil, Saibo Azura, Ulfha Anggelias Wati, Esmeralda Putri, Widya Ningsih, Syfa Dwi A.P, Meidina Sari, Siti Rohima Wati, Yolla Kaselia, Adit Wahyudi, dan teman-teman muamalah B 2017, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan menjadi insan yang bermanfaat untuk umat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sholikhul Huda lahir di Batu Nangkop-Lampun Utara, pada tanggal 22 Maret 2000, anak ketiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak Sarwito dan Ibu Ismiati.

Riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda pada tahun 2005 hingga 2011.
2. Kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Al-Ma'Arif Batu Nangkop pada tahun 2011 hingga 2014.
3. Pada tahun 2014 melanjutkan disekolah Madrasah Aliyah Ma'Arif Batu Nangkop dan lulus pada tahun 2017.
4. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan ke pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada program studi Muamalah Fakultas Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melipahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah.

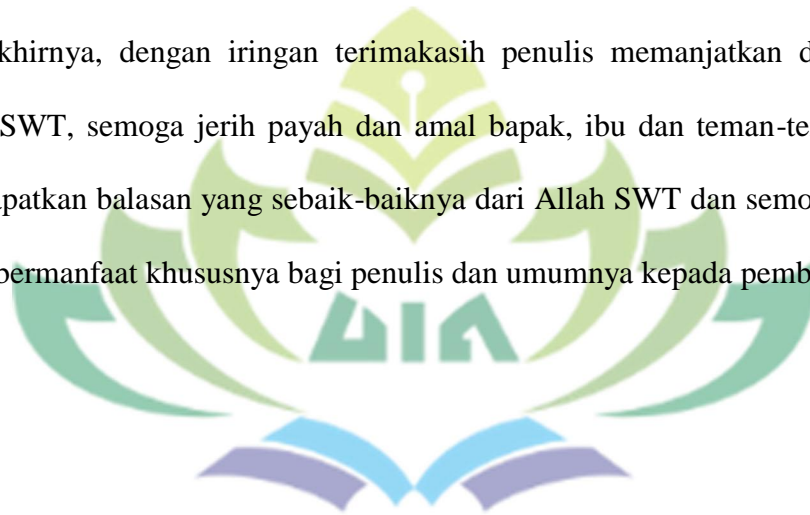
Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Ffakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Llampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syariah.

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku pembimbing II serta ketua jurusan Muamalah dan Ibu Juhrotul Khulwah M.S.I. selaku sekretaris Jurusan Muamalah, serta seluruh staf Jurusan Muamalah.
4. Bapak Drs. H. Ahmad Jalaludin, S.H., M.M. selaku pembimbing I, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kepada rekan-rekan angkatan 2017 jurusan Muamalah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terutama untuk rekan-rekan saya kelas Muamalah B yang selalu memberikan motivasi dan masukannya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.
7. Kepada sahabat seperjuangan dikampus UIN Raden Intan Lampung, Riki Ari Irawan, Adit Wahyudi, Fathonah, Wakhidatul Mukaromah, Ulfi Fatihatur Rosyidah, Mella Risdiyanti, Ni'mah Azzah Fauziyah, Dirla Anisa Putri, Nur Aini Juliyanti, Muhammad Fauzi. Terimakasih atas dukungan dan motivasi serta kebersamaannya selama di UIN Raden Intan Lampung semoga tetap selalu terjaga pertemanan ini.

8. Kepada teman-teman KKN Bumi Ratu, Irfan Siagian, Muhammad Andreansyah, Chandra Alim, Lutfi Azis, Anggi Febriyani, Melani Putri, Tia Mutiara Khasanah, Vivi Rismawati, Fitri Zhaira, Yurisa Puspa Rahmania, Rizka Dewi, Asa Nurma Wati Putri, Suci Fitridayani. Dan keluarga besar bapak Idi Kesuma, yang telah menerima dan menjadi keluarga baru saya.
9. Kepada Bapak Edi Waluyo, S.Pd, selaku kepala Desa Batu Nangkop dan kepada pemilik lahan dan buruh sawit yang telah berbaik hati membantu saya dalam melakukan penelitian guna melengkapi penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.



Bandar Lampung, Maret 2021
Penulis

Sholikhul Huda
NPM. 1721030417

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah	20
B. Dasar Hukum Upah	21
C. Rukun dan Syarat Upah	25
D. Prinsip Keadilan dalam Upah	30
E. Penggolongan Upah	34
F. Waktu Pembayaran Upah	35
G. Sistem Pengupahan dalam Islam	39
H. Berakhirnya Akad Upah	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara	45
1. Sejarah Desa Batu Nangkop	45
2. Visi dan Misi Desa Batu Nangkop	47
3. Demografi Desa Batu Nangkop	47
4. Pendidikan Desa Batu Nangkop	48
5. Perekonomian Desa Batu Nangkop	49

6. Pertanian Desa Batu Nangkop	50
7. Keagamaan Desa Batu Nangkop.....	51
8. Sarana dan Prasarana Desa Batu Nangkop	52
B. Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara	53
BAB IV ANALISA PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.....	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Ssyariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara	63
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	70
B. REKOMENDASI.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Surat Izin Riset dari dinas Penanaman Modal Provinsi Lampung	
Lampiran 2 Surat Izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara	
Lampiran 3 Surat Izin Riset dari Desa Batu Nangkop	
Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perubahan Kepemimoinan Desa Batu Nangkop	46
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Batu Nangkop	47
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Desa Batu Nangkop	48
Tabel 4 Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Batu Nangkop	49
Tabel 5 Kesejahteraan Keluarga	49
Tabel 6 Pengangguran	50
Tabel 7 Pertanian Desa Batu Nangkop	50
Tabel 8 Luas Lahan dan Hasil Komoditas Menurut Jenis Komoditas	51
Tabel 9 Jenis Populasi Ternak	51
Tabel 10 Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah	52
Tabel 11 Sarana dan Prasana	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini.

Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara).” Selanjutnya penulis tegaskan beberapa Istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah hasil meninjau,¹ maksud Hukum Ekonomi Syari’ah dalam penelitian ini adalah Fiqh Muamalah, Fiqh Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.² Buruh Petik Sawit adalah orang yang bekerja memetik/memanen

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

buah sawit.³ Upah Borongan adalah cara pengupahan atau penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.⁴

Dengan penegasan judul di atas, maka maksud dari skripsi ini adalah meninjau dari Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan sistem borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi, sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁵

Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam dan lain sebagainya.⁶

Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antara sesama manusia yaitu kerja sama yang diadakan antara satu pihak sebagai

³Try Wahyudi, wawancara dengan buruh, Batunangkop-Lampung Utara, 25 Juli 2020.

⁴Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja* (Jakarta; PT Raja GrafindoPersada, 2007), h. 69.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h. 1-2.

⁶ Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

penyedia jasa manfaat atau tenaga, yang lazim disebut buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan. Kerjasama seperti ini dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al-ijarah*), yaitu *ijarah a'la al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain.⁷

Upah merupakan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁸

Dalam menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai kehendak syari'ah, bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam "*Al-Ahkam al-Suthaniah*" berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.⁹ Seorang pekerja berhak untuk mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya dalam bekerja.

Untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh.¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 279, sebagai berikut:

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 133.

⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014), h. 149.

⁹ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h. 55-56.

¹⁰ Insaini Harahap, et.al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 81.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al-Baqarah [2] ayat:279).

Dalam Islam, pemberian upah bagi pekerja disebut juga ujah. Menurut Idris Ahmad, upah memiliki arti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti sesuai dengan syarat-syarat tertentu.¹¹

Ujah ada karena adanya akad *ijarah*, adapun *ijarah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban diantara keduanya.¹²

Dalam fiqih muamalah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.¹³ Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhan. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 115 .

¹² Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31.

¹³ Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 296.

hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berupa upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja atau beban kerjanya.¹⁴

Masyarakat Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang buruh dalam berbagai bidang, salah satunya sebagai buruh petik sawit. dalam pekerjaannya biasanya buruh petik sawit ini berjumlah sekitar 2/3 orang, setiap selesai pekerjaannya buruh petik sawit berhak menerima upah, upah itu sendiri merupakan salah satu bentuk pemberian yang terdapat dalam suatu akad kerja sama antara satu orang dengan orang lainnya, yang termasuk kedalam kategori akad yang dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *al-ijarah*.

Upah itu sendiri dibayarkan kepada buruh/pekerja petik sawit setelah selesai bekerja, umumnya upah pekerja/buruh petik sawit dihitung dengan Jumlah *Tonase* yang didapat/ seberapa banyak bobot buah sawit yang dipanen bukan hitungan pekerja harian ataupun borongan, contohnya apabila buah sawit yang dipanen mendapatkan *Tonase*/bobot 1 Ton buah sawit, maka buruh/pekerja sawit dapat menerima upah sebanyak Rp 300.000, namun yang dipermasalahkan dalam penelitian ini adalah upah buruh/petik sawit dengan sistim borongan, karena jika dihitung upah dengan upah borongan ini dapat merugikan kedua belah pihak, baik pihak *mu'ajir* (yang menerima upah) atau pihak *musta'jir* (pemberi upah) karena

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 405.

ketidakpastian pendapatan buah sawit disetiap panennya, ketidakpastian lama waktu pekerjaannya dan ketidakpastian beban kerjanya. Kerugian dapat dialami pihak *mu'ajir* (penerima upah), Lukman merupakan salah satu buruh petik sawit, lukman bekerja memetik sawit milik bapak Andi selaku *musta'jir* (pemilik lahan), yang memiliki luas lahan perkebunan sawit seluas 1 ha, dengan upah borongan sebesar Rp 500. 000. Namun setelah selesai pekerjaannya ternyata dalam memanen buah sawitnya memakan waktu yang lama dan beban kerja yang jelas lebih berat. Dan hasil buah sawit yang dipanen ternyata mencapai bobot hingga 5 Tonase. Dengan perhitungan 5 Tonase buah sawit dikalikan dengan harga Rp 1000 dan potongan 8%, sehingga uang hasil panen senilai Rp 4. 600. 000. Seharusnya dengan jumlah Tonase tersebut buruh/pekerja sawit dapat menerima upah senilai Rp 1. 500. 000, bukan hanya Rp 500.000.Sedangkan kerugian dapat dialami oleh *musta'jir* apabila buah sawit yang dipanen hanya sedikit.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut bagaimana penetapan tentang imbalan *ujrah*/upah yang dilakukan oleh para buruh petik sawit yang berada di Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan judul penelitian: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan" (Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan Uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Praktek pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan upah borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara?
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan upah borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara?

D. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan upah borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan upah borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan mengetahui mengenai praktek pelaksanaan upah buruh petik Sawit Dengan Upah Borongan di Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan di Desa Batunangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

- a. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Secara Teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep upah, sistem pengupahan yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah (Hukum islam) yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam pengupahan buruh petik sawit dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah pada Khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Selain itu, penelitian yang terdahulu juga dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang saling terkait. Di antara penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Intan Mariska Aretra yang berjudul “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah” UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan sistem upah borongan buruh roti pada UD Cahaya Niaga di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Kesimpulannya jika ditinjau dari fiqih muamalah sistem upah borongan yang diterapkan oleh UD Cahaya Niaga belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukumnya tidak sah karena salah satu rukun dan syarat ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi yaitu *ujrah* (upah), dimana ketentuan tentang upah dalam Islam harus di sepakati dan tidak boleh gharar. Karena tidak adanya penjelasan oleh pemborong roti goreng kepada anggota borongannya dalam penetapan upah. Dan dalam penentuan

upah masih jauh dari ketentuan fiqh muamalah yang mengharuskan keadilan dan kelayakan.¹⁵

2. Skripsi oleh Sony Oktavian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan”. UIN Raden Intan Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada perusahaan tersebut. Kesimpulannya Jika ditinjau dari hukum Islam maka sudah memenuhi rukun dan syarat pengupahan namun terdapat salah satu prinsip ijarah yang belum terpenuhi didalamnya, yaitu prinsip keadilan bagi pihak penyadap karet borongan.¹⁶
3. Skripsi oleh Qorri Uyunina yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. IAIN Ponorogo. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan sistem borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo (2) bagaimana tinjauan fiqh

¹⁵ Intan Mariska Aretra “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”.

¹⁶ Sony Oktavian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan”.

muamalah terhadap penambahan upah sistem borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo (3) bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap keterlambatan waktu pengerjaan dalam praktik sistem borongan memanen padi di desa prajegan kecamatan sukorejo kabupaten ponorogo. Kesimpulannya (1) akad dasar penetapan upah jasa yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa dalam penetapan upah jasa telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya, sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah. (2) termasuk dalam ajrun musamma, dimana upah telah disebutkan pada saat transaksi, yaitu kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan. Disamping itu, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya pihak penyedia jasa meminta untuk diberikan bayaran lebih besar, sehingga hal tidak sesuai dengan ketentuan dalam fiqh muamalah. (3) mengenai keterlambatan waktu pengerjaan, termasuk dalam bentuk wanprestasi, yaitu pekerja melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat. Dan hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian, dimana dalam praktiknya penyedia jasa tidak melakukan pekerjaan sesuai yang telah disepakati dalam akad.¹⁷

¹⁷ Qorri Uyunina "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo".

Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan di mana dalam Upah Borongan buruh petik Sawit disini di hitung berdasarkan luas lahan perkebunan sawit yang hendak di panen.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.¹⁸ Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang pelaksanaan upah buruh yang sesuai dengan Hukum Islam (Fiqih Muamalah) dengan objek penelitian di Desa Batunangkop Lampung Utara.

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁹ Penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan sistem borongan di Desa Batunangkop Kabupaten Lampung Utara.

¹⁸ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.²⁰ Dalam penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syari'ah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan sistim borongan.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan sistem borongan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Hasil wawancara dalam penelitian ini diperoleh dari responden langsung, yaitu dari pemberi upah (pemilik kebun sawit) dan penerima upah (para buruh petik sawit) yang berkaitan dengan pelaksanaan upah dengan sistim borongan.

b. Data Skunder

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h. 26.

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

Data skunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau dokumen.²² Data sekunder dalam hal ini adalah beberapa buku-buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, maupun dari pihak lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²³ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 143 orang yang terdiri dari 23 orang sebagai pemilik lahan sawit dan 120 orang sebagai buruh petik sawit.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang telah diteliti, apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan jika jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10%, 15%,

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137.

²³ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

20%, dan 25%.²⁴ Karena populasi dalam penelitian ini di atas 100 orang yaitu berjumlah 143 orang maka sampel diambil 10%, jadi sampel dalam penelitian ini adalah $143:10\% = 14$ orang, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 14 orang, maka peneliti mengambil 4 orang sebagai pemilikan dan 10 orang sebagai buruhnya. Maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik random sampling, simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.²⁵

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.²⁶ Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁷

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 109-112.

²⁵ Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behaviour* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 188

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h.224.

²⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bmi Aksara, 2015), h. 70.

Observasi yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan sistem borongan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸ Dalam hal ini penulis mewawancarai sejumlah buruh petik sawit dan pemilik lahan sawit selaku pemberi upah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.²⁹

6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan

²⁸ *Ibid*, h. 83.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*...., h. 188.

atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.³⁰

b. Koding

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.³¹

c. Sistemating

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.³²

d. Analisa Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus

³⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian.....*,h. 153

³¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian.....*, h. 154

³² Mardalis, *Metode Penlitian Suatu Proposal.....*, h. 21.

dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami di diri sendiri dan orang lain.³³

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan Upah Borongan yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang atau kaidah-kaidah lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.³⁴

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk menghantarkan pada permasalahan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan upah buruh, maka pada bab ini akan

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*..., h. 145.

³⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*..., h. 4.

dibahas pengertian dan dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, prinsip keadilan upah, jenis-jenis upah, penggolongan upah, waktu pembayaran upah, sistem pengupahan dalam Islam, dan berakhirnya akad upah.

Bab ketiga, berisi tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, dengan sub bab pertama adalah gambaran umum lokasi penelitian diantaranya sejarah desa, visi misi desa, demografi desa, pendidikan desa, perekonomian desa, pertanian desa, keagamaan desa, serta sarana dan prasarana desa dan sub bab kedua adalah pelaksanaan upah buruh petik sawit yang terjadi di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara.

Bab keempat analisis pelaksanaan upah buruh petik sawit yang terjadi di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara baik dari segi akad dan pelaksanaan pengupahan yang terjadi antara pemilik lahan dengan buruh, Bab kelima adalah penutup guna mengakhiri pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah(*Ijarah*)

Secara etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-‘iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.³⁵ Sedangkan menurut syariat Islam *Ijarah* adalah hak dari orang yang telah bekerja dan berkewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja membayarnya.³⁶

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, *Ijarah* ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaganya (*musta’jir*), serta pemilikan harta dari *musta’jir* oleh *ajir*, dimana *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa yang disertai dengan kompensasi (imbalan).³⁷ Sedangkan menurut pernyataan Professor Benham *ijarah* adalah uang yang dibayar oleh orang yang member pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya.³⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan upah (*Ijarah*) adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk

³⁵ Sohari sahrani dan ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

³⁶ M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan* (Jurnal AL-‘ADALAH, Vol 14, Nomor 2, 2017), h. 484.

³⁷ Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 231.

³⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 361.

mengerjakan suatu pekerjaan.³⁹ Sedangkan menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.⁴⁰

B. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Dasar hukum *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an

Surat At-Thalaq [65] ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

³⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah, 2014), h. 141.

⁴⁰ Hendy Herjianto, Muhammad Nurul Hafiz, *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing* (Jurnal Islaminomic, 2016), h. 13

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

An-Nahl [16] ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Maksud balasan dalam ayat di atas adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) ataupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda.

Al-Qasas [28] ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَعْجَرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرَتْ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ
 عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”(26). Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik” (27)”.

2. Dasar Hukum Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ لَدَخَلْنِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَا هُوَ الْمُذَارَعَةَ
 فَقَالَ زَعَمْنَا بِثَأْنٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ

مُزَارَعَةٍ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (رواه المسلم)

“dari Abdullah bin Sa’ib berkata: “kami masuk menemui Abdullah bin ma’qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzarah? Maka Jawabnya: ‘Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzarah dan memerintahkan

(membolehkan) mujarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: mujarah itu tidak apa-apa (boleh)". (HR. Muslim).⁴¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ مَا الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ

وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوَى فِي مَنَّهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw Bersabda: “Allah ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari harganya) dan seorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayarkan upahnya”. (HR. Bukhari)⁴²

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجِمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ

(رواه البخاري والمسلم)

“dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upah kepada tukang bekam itu”. (HR. Bukhari dan Muslim)⁴³

⁴¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *mukhtashar Shahih Muslim* (Ringkasan Shahih Muslim) (Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008), h. 637.

⁴² Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 531.

⁴³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari Dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), h. 105.

3. Dasar Hukum *Ijma'*

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *Ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal itu dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain, *ijarah* adalah suatu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi oleh manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam hidup manusia.

C. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

1. Rukun Upah (*Ujrah*)

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* dengan kata lain pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi ialah akad atau perjanjian diantara kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.⁴⁴ *Ijarah* sebagai sebuah transaksi umum baru di anggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *ijarah* hanya *ijab* dan *qabul*.

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijarah*, yaitu:

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.

- a. Sighat *ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain
- b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa atau penyewa/pengguna jasa. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi
- c. Objek akad *ijarah*
 - 1) Manfaat barang atau sewa
 - 2) Manfaat jasa dan upah. Upah atau *ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.⁴⁵

2. Syarat Upah (*Ujrah*)

Pertama, syarat terjadinya akad (*Syarat al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna.

⁴⁵ Rizki Fadli, Zainudin, Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, No 2, Oktober 2020), h.169.

Oleh karena itu orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu haruslah orang yang sudah dewasa tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz*.⁴⁶

Kedua, syarat pelaksanaan *ijarah* (*Syurut al-al-nafadz*), akad *ijarah* dapat dilakukan apabila ada kepemilikan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.

Ketiga, syarat sah (*Syurut al-shihah*) terkait dengan pihak-pihak yang berakad, objek akad, dan upah, syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh melakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar paksaan, baik paksaan itu datang dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.⁴⁷
- b. Objek akad, yaitu manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *ijarah*.⁴⁸
- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat dipenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek

⁴⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 35.

⁴⁸ *Ibid*, h. 107.

sewa juga harus terpenuhi secara syara' oleh karena itu tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajarkan sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan para ulama ahli fiqih.

- d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah (boleh) dalam syara' seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali atau sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara', berdasarkan dalil ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain.⁴⁹
- e. Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an.

⁴⁹ *Ibid*, h. 108.

- f. Orang yang menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.⁵⁰
- g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
- h. Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.⁵¹ Adapun syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:
 - 1) Upah yang dibayarkan harus suci bukan benda najis, akad *ujrah* tidak sah jika upahnya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau *khamar*. Semua itu benda-benda najis.⁵²
 - 2) Upah harus dapat dimanfaatkan, sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat,

⁵⁰ *Ibid*, h. 109

⁵¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 235.

⁵² Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h. 159.

seperti alat-alat permainan yang melalaikan, patung dan gambar-gambar.⁵³

- 3) Upah harus dapat diserahkan, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di dalam air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*dighasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta *dighasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.
- 4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah . jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakal itu tidak sah dijadikan upah.⁵⁴
- 5) Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama, syarat mal muttaqawwin diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam akad jual beli.
- 6) Upah atau sewa menyewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *mauqud alaih* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.⁵⁵ Misalnya menyewa rumah untk ditinggali yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian

⁵³ *Ibid*, h. 160.

⁵⁴ *Ibid*, h. 161.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.326.

dengan tanah pertanian, ini merupakan pendapat Hanafiah, akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukan ini sebagai syarat untuk ujarah.⁵⁶

D. Prinsip Keadilan dalam Upah Mengupah

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku pada semua wilayah kegiatan manusia, baik dalam bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi keseluruhan aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, dan pertukaran.⁵⁷

Dalam hukum Islam juga menetapkan beberapa prinsip-prinsip yang berpengaruh kepada pelaksanaan perjanjian ijarah kepada para pihak yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut :

1. Prinsip kebebasan berkontrak

Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah [05] ayat 1:

⁵⁶ *Ibid*, h.367.

⁵⁷ Muhammad Sharif Chaudy, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 45.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

2. Prinsip perjanjian itu mengikat

Allah SWT menganjurkan kepada manusia dalam melakukan perjanjian harus secara tertulis, adanya saksi-saksi agar sebuah perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Israa' [17] ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.

3. Prinsip Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan, baik antara apa yang akan diberikan dan apa yang

akan diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak boleh ada suatu kedzaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.⁵⁸

4. Prinsip Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (*masyaqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*) di antara para pihak yang melakukan perjanjian.

5. Prinsip amanah

Bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik termasuk kejujuran dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.⁵⁹ Selain itu, apabila tidak adanya kejujuran maka akan menimbulkan kecurigaan diantara para pihak.

6. Prinsip keadilan

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering kali disebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., h. 33.

⁵⁹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 37.

lebih dekat kepada taqwa. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah [05] ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pengupahan harus ditetapkan berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran serta dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun, diantara ajarannya yaitu terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Tingkat upah minimum dalam sebuah masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian, dan perumahan, untuknya dan juga keluarganya.⁶⁰

E. Penggolongan Upah

1. Upah Sistem Waktu

Dalam Upah Sistem Waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu lama kerja seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Besarnya upah sistem waktu didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerja.

2. Upah Sistem Hasil (*Output*)

Upah sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil bukan didasarkan kepada lamanya waktu pekerjaan.

3. Upah Sistem Borongan

Upah sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.

⁶⁰ Muhammad Sharif Chaudy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar....*, h. 199.

Penetapan besarnya balas jasa cukup rumit, seperti lama mengerjakannya serta banyaknya alat yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya.⁶¹

F. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksidan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.⁶²

Dalam menentukan upah yang adil bagi seorang pekerja yang sesuai kehendak syariah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Mawardi dalam "*Al-Ahkam al-Suthaniah*" berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.⁶³ Seorang pekerja berhak mendapatkan upah yang adil atas kontribusinya dalam bekerja, untuk menentukan standar upah yang adil dan batasan-batasan yang

⁶¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja....*, h. 72.

⁶² Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 874.

⁶³ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), h. 56.

menunjukkan eksploitasi terhadap pekerja, Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah, yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh.⁶⁴ Sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ص وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Dalam fiqih muamalah, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.⁶⁵ Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan dapat memenuhi kebutuhan. Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan kerja terjalin. Adil juga bermakna sesuai dengan jerih payah pekerja

⁶⁴ Insaini Harahap, et.al, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 81.

⁶⁵ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31.

atau beban kerjanya.⁶⁶ Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil, supaya keputusan itu benar-benar adil dalam artian terdapat keseimbangan antara tingkat upah yang ditetapkan antara pekerja tidak terlalu rendah sehingga mencukupi biaya kebutuhan pokok dan juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama itu.⁶⁷

Upah tidak menjadi milik dengan hanya sekedar akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggukannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguknya yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat menangguk, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁶⁸

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁶⁹ Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kedalam kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

⁶⁶ Yusuf Qardawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 405

⁶⁷ Sri Dewi Yusuf, *Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam* (Jurnal Al-Ulum, Vol 10, No 2, Desember 2010), h. 313.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13* (Bandung: PT Alma' arif, 1987), h. 20.

⁶⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h. 141.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).

Hadits diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada porang yang telah memberikan jasanya harus dibayarkan sesegera mungkin dan tidak boleh ditunda-tunda karena ada kemungkinan buruh yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadits diatas syeikh yusuf Qardawi dalam kitabnya pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan pekerja apalagi jika penundaan itu sangat lama hingga lupa tidak dibayarkan.⁷⁰ Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi sebagaimana dalam sabdanya:

⁷⁰ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Ekonomi)*...., h. 222.

عَنْ عَمْرِ بْنِ عَا مِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَوْ كَانَتِ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Dari Amr ibn Amir, berkata: Aku mendengar Anas berkata, Rasulullah berbekam dan tidak pernah zalim kepada seseorang membayar upahnya”. (HR. Al-Bukhari).⁷¹

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁷²

G. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu, dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan Upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar,

⁷¹ Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002), h. 529.

⁷² Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadits Ekonomi)*...., h. 223.

yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dicarikan oleh dua hal yaitu dan layak, adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dari pasaran.⁷³ Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak.⁷⁴ Kelas pekerja dan paa majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari

⁷³ Hasbiyallah, *fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), h. 71.

⁷⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa 2002), h.362.

pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja adalah jika majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil mereka bekerja tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudian oleh Allah demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam QS. Al-Jaathiya [45] ayat 22:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benardan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapatkan imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal kerjanya.⁷⁵ Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mu'ajir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja.

1. Ketentuan Kerja

⁷⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 277.

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.⁷⁶

2. Bentuk Kerja

Di dalam *Ijarah* harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang hendak dikerjakan seorang *ajir*.

3. Waktu Kerja

Dalam transaksi *Ijarah* juga harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi dengan jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu, selain itu wajib ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

4. Gaji Kerja

Disyaratkan juga gaji transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan juga tidak asalkan syaratnya jelas.

Upah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), ialah upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
2. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) ialah upah yang sepadan dengan kerjanya setara/sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah

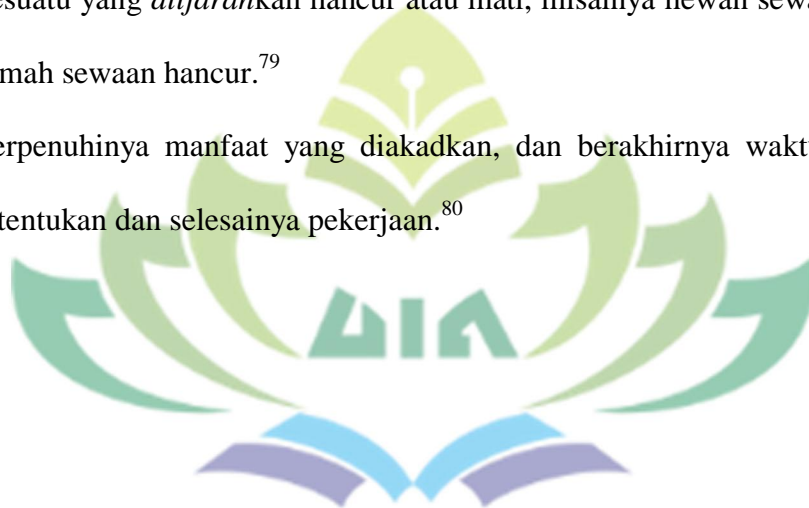
⁷⁶ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, h.229.

harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁷⁷

H. Berakhirnya Akad Upah

Ijarah dapat berakhir karena sebab-sebab sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *Ijarah* dapat berakhir apabila meninggalnya salah satu pihak dari dua orang yang berakad.⁷⁸
2. Akad *ijarah* berakhir (الاقالة) menarik Kembali
3. Sesuatu yang *diijarahkan* hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur.⁷⁹
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan berakhirnya waktu yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁸⁰



⁷⁷ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*..., h.230.

⁷⁸ Ala al-Din al-Kasaniy, *Bada i al-Shana'iy, Juz IV* (t.tp.: t.p.t.,t.t.), h. 222.

⁷⁹ Abdul Raham Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 227.

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h. 122.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Raham Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010
- Afzalurahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia, 2013
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Ala al-Din al-Kasaniy, *Bada i al-Shana'iy*, Juz IV.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Bogor: Kencana, 2003
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil sCipta Media, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasbiyallah, *fikih* Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ibrahim, *Penerapan Fikih*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Ekonomi)* Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Insaini Harahap, et.al, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behaviour* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014.
- Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, shahih al-Bukhari, no 2227 (Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Muhammad Sharif Chaudy, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* Jakarta: Kencana, 2008.
- Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Radar Jaya Offset, *Peraturan Upah Minimum Di 27 Provinsi Indonesia Edisi 1993*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1993.
- Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13* Bandung: PT Alma' arif, 1987.
- Sohari sahrani dan ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000.

ZaeniAsyhadie, *Hukum Kerja* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Dokumen

Profil Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah, Tahun 2019-2024.

Hadits

Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no 2227, Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari Dan Muslim*, Jakarta: Gramedia, 2017.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)*, Jakarta: Pustaka As-sunah, 2008.

Internet

<https://kbbi.web.id>> petik Hasil web Arti kata petik - Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) Online. 16 Mei 2020, 10.14 WIB

Jurnal

Hendy Herjianto, Muhammad Nurul Hafiz, Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing, *Jurnal Islaminomic*, Vol. 7 Np, 1, April 2016.

M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, Jurnal AL-‘ADALAH, Vol 14, Nomor 2, 2017.

Sri Dewi Yusuf, Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10 No. 2, Desember 2010.

Rizki Fadli, Zainudin, Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 3, No 2, Oktober 2020.

Skripsi

Intan Mariska Aretra “Penerapan Sistem Upah Borongan Buruh Roti Pada UD Cahaya Niaga Di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”.

Sony Oktavian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Bagi Penyadap Karet Borongan Studi Kasus Pada Pabrik Karet PTPN VII Unit Kedaton Desa Way Galih Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan”.

Qorri Uyunina “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Menganen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.

Wawancara

Andi Prianto, wawancara dengan pemilik lahan sawit, Batu Nangkop-Lampung Utara, 07 November 2020.

Adi Nugroho, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020.

Agung Prasetyo, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020.

Haryanto, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020

Isnanto, wawancara dengan pemilik lahan sawit, Batu Nangkop-Lampung Utara, 07 November 2020.

Lukman Rifa'i, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020.

Maidin, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020.

Markum, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020.

Rinto Setiono, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020.

Sudendi, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020.

Sukron Anwar, wawancara dengan pemilik lahan sawit, Batu Nangkop-Lampung Utara, 07 November 2020.

Try Wahyudi, wawancara dengan buruh, Batunangkop-Lampung Utara, 25 Juli 2020

Sunardi, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020.

Saiful, wawancara dengan buruh, Batu Nangkop-Lampung Utara, 08 November 2020.

